

ULASAN ILMIAH

PEMBANGUNAN PERIKANAN PADA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG II (PJPT II)

Kardiyo Praptokardiyo dan Ismudi Muchsin¹

PENDAHULUAN

Sub-sektor perikanan merupakan bidang yang paling kompleks diantara subsektor-subsektor pertanian yang lain. Hal ini antara lain disebabkan karena dimensi sumberdaya yang dinamis dengan batasan-batasannya yang sangat relatif. Oleh karena itu pembangunan sub-sektor perikanan memerlukan pemikiran yang spesifik.

Berbagai pemikiran telah banyak dicurahkan untuk penyusunan strategi pembangunan perikanan, antara lain pemikiran yang paling baru adalah hasil *Workshop on Fisheries Policy and Planning* oleh Dirjen Perikanan dan Fisheries Forum I dan II oleh Litbang Perikanan, serta Fisheries Forum III oleh Ditjen Perikanan dan Badan Litbang Pertanian. USAID mensponsori pertemuan-pertemuan tersebut. Dari hasil pemikiran-pemikiran tersebut hampir semua aspek permasalahan bidang perikanan dan strategi telah tertuang.

Demikian luas cakupan aspek dan permasalahannya, sehingga dalam penyusunan strategi pembangunan perikanan sulit untuk dipadukan dalam satu fokus pembangunan yang sentral. Di dalam tulisan ini akan dicoba memilah-milah dan kalau mungkin dengan introduksi pola pemikiran yang baru untuk menghasilkan pola pembangunan perikanan yang efisien.

Untuk mencari pola yang efisien salah satu langkah yang harus ditempuh adalah melalui usaha pengelompokan permasalahan yang ada kemudian diikuti dengan penyusunan prioritas-prioritas yang nantinya merupakan bahan bagi penyusunan strategi pembangunan. Strategi pembangunan yang akan dipakai hendaknya harus dapat dijabarkan ke dalam suatu program pembanguan yang sistematis dan mantap yang mengarah pada pemenuhan tujuan yang telah digariskan dalam tujuan nasional pembangunan perikanan antara lain adalah menghasilkan bahan pangan protein hewani bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan agro-industri di dalam negeri melalui penyediaan bahan baku, menghasilkan devisa melalui kegiatan ekspor hasil perikanan, serta meningkatkan pendapatan petani/nelayan dalam rangka memberantas kemiskinan yang melilit mereka.

¹Fakultas Perikanan, Institut Pertanian Bogor (IPB)

Jl. Rasamala, Kampus Darmaga, Bogor 16680 Indonesia

PERMASALAHAN

Pembangunan sub-sektor perikanan merupakan salah satu andalan bagi sumber pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam menghadapi tahap tinggal landas.

Kegiatan sub-sektor perikanan yang meliputi kegiatan eksploitasi serta peningkatan mutu hasil perikanan melalui penerapan teknologi tepat guna, pengembangan usaha dan kelembagaan, pembinaan serta penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kelestarian sumberdaya perikanan merupakan kegiatan yang saling terkait satu sama lain. Disamping itu nelayan/petani ikan kecil, BUMN dan pihak swasta yang merupakan subyek pembangunan perikanan harus cukup tangguh dalam melaksanakan pembangunan perikanan di masa mendatang, sebagai suatu prasyarat untuk lepas landas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masalah yang dihadapi pada PJPT I dan masih harus di selesaikan pada PJPT II adalah :

1. Sumberdaya alam belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal, khususnya untuk Wilayah IBT belum secara efektif dan efisien dimanfaatkan.
2. Produktivitas usaha perikanan masih rendah, baik berkenaan dengan tingkat teknologi, modal serta kesiapan ketrampilan dari para pelaksana.
3. Peningkatan peranan sub-sektor perikanan dalam peningkatan devisa negara belum mantap serta tergantung oleh permintaan pasar dunia ditambah dalam kegiatan Pasca Panen dan pemasaran masih belum efisien.
4. Sumberdaya alam yang diperlukan sub-sektor perikanan yang berupa lahan pantai, air tawar status penguasaan dan peruntukannya berada di luar "kekuasaan" sub-sektor perikanan.
5. Masalah-masalah penunjang antara lain kelembagaan pelayanan, permodalan/pembiayaan pembangunan serta pengembangan ternyata masih perlu diselesaikan dalam menghadapi TINGGAL LANDAS.

Di masa-masa mendatang khususnya pada dekade ini, pembangunan perikanan akan menghadapi berbagai tantangan disamping masalah yang tersebut di muka, yaitu :

1. Pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya alam, tenaga dan modal akan semakin kompetitif, sehingga dapat terjadi suatu kecenderungan pemanfaatan sumberdaya yang lebih memberikan manfaat sepiantas tanpa memperhatikan daya dukung dan kelestarian, dengan mengundang berbagai penerapan teknologi yang sebenarnya tidak tepat. Hal ini sudah terjadi pada budidaya tambak intensif dan budidaya keramba terapung.

2. Sifat pembangunan perikanan, akan semakin kompleks dan kompetitif yang ditandai dengan semakin ketatnya kaitan dan ketergantungan lintas sub-sektor dan sektoral, dengan kecenderungan para pelaku pembangunan perikanan membentuk usaha dalam skala usaha besar padat modal.
3. Penggunaan dan ketersediaan dana dari pemerintah akan semakin terbatas sehingga mendorong mobilisasi modal masyarakat dan pemanfaatan dan kredit dari pihak swasta.
4. Pertumbuhan angkatan kerja baru akan selalu meningkat menuntut kesempatan kerja dan berusaha di berbagai sektor, dan secara langsung akan menjadi beban keberhasilan pembangunan perikanan.

Tantangan dan masalah pembangunan sub-sektor perikanan merupakan suatu beban berat yang harus sudah dapat diatasi selama tahap pembangunan siap lepas landas. Kegiatan perikanan, khususnya perikanan rakyat perorangan maupun perkoperasian perlu ditata dan dikaji di tengah-tengah keikutsertaan usaha swasta/BUMN. Penataan pemanfaatan sumberdaya serta tata ruang lahan perikanan perlu ditetapkan terhadap rencana serta tingkat eksploitasi sumberdaya perikanan yang terjadi selama ini. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan, khususnya perikanan rakyat akan memperjelas keberadaan serta kesiapan sub-sektor perikanan dalam "Lepas Landas Pembangunan Nasional".

STRATEGI PEMBANGUNAN PERIKANAN

Kunci keberhasilan pembangunan perikanan terletak kepada :

1. Kesiapan berusaha antara perikanan rakyat, BUMN dan swasta dalam memanfaatkan potensi serta keunggulan kompetitif sumberdaya perikanan, dalam alam globalisasi dan regionalisasi perekonomian dunia.
2. Kebersamaan antara usaha perikanan rakyat dan usaha industri perikanan sebagai konsekuensi logis dari usaha pemanfaatan sumberdaya perikanan yang terbatas.
3. Peningkatan produksi harus berorientasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan/petani ikan dan para pelaku perikanan langsung lainnya. Perencanaan "Bottom Up" dari daerah otonomi tingkat II perlu dijadikan dasar perencanaan pembangunan sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada, serta mampu menampung partisipasi berkaitan kerjasama antara perikanan rakyat, BUMN dan swasta.

Kebijaksanaan pembangunan perikanan di masa datang perlu tetap secara konsisten melaksanakan Trimatra Pembangunan Pertanian ditunjang oleh pengembangan usaha perikanan secara terpadu dalam mempercepat proses kesiapan tinggal landas. Dalam tahap tinggal landas tersebut merupakan suatu tahap penentu bagi pembentukan suatu sistem perekonomian di sub-sektor perikanan yang saling menunjang bagi pertumbuhan ekonomi selanjutnya. Berhubung potensi sumberdaya perikanan cukup besar disertai dengan keunggulan kompetitif maka reorientasi investasi pembangunan perikanan dengan penataan setiap pengembangan usaha akan merupakan ujung tombak di masa mendatang.

Strategi pembangunan perikanan pada PJPT II meliputi :

1. Penentuan wilayah pemanfaatan sumberdaya serta pendekatan integrasi antara sub-sektor industri penunjang (pengadaan peralatan dan sarana produksi serta pengolahan) dan atau pengembangan suatu usaha agro-industri di sub-sektor perikanan.
2. Dimensi pembangunan perikanan difokuskan kepada pemanfaatan optimal sumberdaya perikanan sesuai dengan daya dukung sumberdaya serta keunggulan kompetitif dari komoditi perikanan yang layak dieksploitasi. Penataan wilayah pemanfaatan dari ketersediaan lahan maupun sumberdaya perairan harus segera ditetapkan untuk dijadikan dasar pijak bagi pengembangan pusat produksi perikanan di masa mendatang.
3. Penataan kesempatan serta perlindungan pengembangan usaha antara usaha perikanan rakyat, BUMN, dan swasta dimana pengembangan pola TIR/PIR di sub-sektor perikanan perlu ditata disamping pengembangan usaha perikanan industri di pusat wilayah pengembangan.
4. Peningkatan produksi perikanan baik melalui usaha ekstensifikasi, intensifikasi maupun diversifikasi harus ditujukan kepada peningkatan dan pemerataan pendapatan rakyat, khususnya petani ikan dan nelayan.

KEBIJAKSANAAN

Kebijaksanaan pembangunan perikanan di masa datang perlu diarahkan untuk :

1. Penguasaan iptek, dan mempercepat pengembangan serta penerapan iptek tersebut untuk mendukung program pembangunan perikanan dalam usaha mengatasi kesenjangan distribusi pendapatan maupun peningkatan produksi diantara para pelaku perikanan yang bermodal lemah dan kuat.

2. Titik berat pengembangan perikanan rakyat adalah untuk pemenuhan kebutuhan pangan protein dalam negeri dan bahan industri, sedang pengembangan perikanan oleh BUMN dan swasta besar produksinya untuk ekspor dan bahan baku industri.
3. Mengembangkan kelembagaan ekonomi, yang mampu mewadahi kepentingan lembaga koperasi, BUMN dan swasta dalam suatu tatanan pengembangan usaha yang srsi dalam mengeksploitasi, menanggung resiko maupun keuntungan.
4. Monitoring dan evaluasi secara obyektif dan berkala terhadap setiap kegiatan pemanfaatan sumberdaya, pengembangan usaha perikana. tindakan perbaikan secara dini mulai harus dilaksanakan dalam usaha optimasi pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber dana.